

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Relevansi

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkut paut, yang ada hubungan, selaras dengan.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan.² Sedangkan menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat.³ Dengan demikian dapat dipahami bahwa relevansi adalah hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

B. Kurikulum

1. Pengertian Kurikulum

Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Latin “*curir*” yang artinya pelari, dan “*curene*” yang artinya “tempat berlari”.⁴ Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kurikulum yaitu perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan dan perangkat mata

¹Paus Apartando, *Kamus Populer*, (Surabaya: PT. Arkola, 1994), h. 666.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 943.

³Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 150-151

⁴Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 150-151

kuliah mengenai bidang keahlian khusus.⁵ Lebih lanjut Sudjana menyatakan bahwa kurikulum harus menjawab persoalan yaitu kemana program akan diarahkan, yang apa dipelajari dalam program tersebut, bagaimana program harus dilaksanakan dan bagaimana mengetahui program tersebut telah mencapai arah yang telah ditetapkan.⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah mata pelajaran-mata pelajaran yang dibuat untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan diri yang sesuai dengan keahlian khusus di bidang yang ditekuni.

2. Fungsi Kurikulum

Dalam proses belajar jelas kedudukan kurikulum sangat penting, karena dengan kurikulum maka mahasiswa sebagai individu yang berkembang akan mendapatkan manfaat. Kurikulum mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:⁷

Secara umum fungsi kurikulum adalah sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan pribadinya ke arah tujuan pendidikan. Kurikulum itu segala aspek yang mempengaruhi peserta didik di sekolah, termasuk guru dan sarana serta prasarana lainnya. Kurikulum sebagai program belajar bagi siswa, disusun secara sistematis dan logis, diberikan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebagai

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 617

⁶ Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), h. 5.

⁷ Slameto, *Proses Belajar Mengajar dalam Sistem Kredit Semester (SKS)*, (Jakarta, Rajawali Press, 2012), h. 4-5

program belajar, kurikulum adalah niat, rencana dan harapan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kurikulum adalah alat yang digunakan oleh pendidik untuk membantu peserta didik dalam proses belajar.

Menurut Inglis, kurikulum mempunyai beberapa fungsi yaitu:⁸

- a. Fungsi Penyesuaian. Karena individu hidup dalam lingkungan , sedangkan lingkungan tersebut senantiasa berubah dan dinamis, karena itu setiap individu harus mampu menyesuaikan diri secara dinamis. Dibalik lingkungan pun harus disesuaikan dengan kondisi perorangan. Di sinilah letak fungsi kurikulum sebagai alat pendidikan menuju individu yang lebih baik.
- b. Fungsi Integras. Kurikulum berfungsi mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi. Oleh karena individu itu sendiri merupakan bagian integral dari masyarakat, maka pribadi yang terintegrasi itu akan memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan atau pengintegrasian masyarakat.
- c. Fungsi Diferensiasi. Kurikulum perlu memberikan pelayanan terhadap perbedaan-perbedaan perorangan dalam masyarakat. Pada dasarnya diferensiasi akan mendorong orang berpikir kritis dan kreatif, dan ini akan mendorong kemajuan sosial dalam masyarakat.
- d. Fungsi Persiapan. Kurikulum berfungsi mempersiapkan siswa agar mampu melanjutkan studi lebih lanjut untuk jangkauan yang lebih jauh atau terjun ke masyarakat. Mempersiapkan kemampuan sangat

⁸ I Made Kartika, *Pengertian Peranan dan Fungsi Kurikulum*, artikel diakses pada tanggal 05 Maret 2019 dalam <https://astawan.files.wordpress.com/2010/06/kurikulum-1.pdf>

perlu, karena sekolah tidak mungkin memberikan semua apa yang diperlukan atau semua apa yang menarik minat mereka.

- e. Fungsi Pemilihan, antara keberbedaan dan pemilihan mempunyai hubungan yang erat. Pengakuan atas perbedaan berarti pula diberikan kesempatan bagi seseorang untuk memilih apa yang diinginkan dan menarik minatnya. Ini merupakan kebutuhan yang sangat ideal bagi masyarakat yang demokratis, sehingga kurikulum perlu diprogram secara fleksibel.
- f. Fungsi Diagnostik. Salah satu segi pelayanan pendidikan adalah membantu dan mengarahkan para siswa agar mereka mampu memahami dan menerima dirinya sehingga dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Ini dapat dilakukan bila mereka menyadari semua kelemahan dan kekuatan yang dimiliki melalui eksplorasi dan prognosa. Fungsi kurikulum dalam mendiagnosa dan membimbing siswa agar dapat mengembangkan potensi siswa secara optimal. Sedangkan fungsi kurikulum secara praktis yaitu:

1) Fungsi Kurikulum bagi Mahasiswa

Kurikulum sebagai organisasi belajar tersusun, adalah disiapkan untuk mahasiswa sebagai salah satu konsumsi pendidikan mereka. Dengan ini maka diharapkan mereka akan mendapat sejumlah pengalaman baru yang kelak kemudian hari dapat dikembangkan seiring dengan perkembangannya, guna melengkapi bekal hidupnya.

2) Fungsi Kurikulum bagi Dosen

Bagi dosen kurikulum berfungsi sebagai:

- a) Pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar para mahasiswa dan
- b) Pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan mahasiswa dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan.

c. Fungsi Kurikulum bagi Rektor dan Pembantu Rektor I atau Dekan dan Pembantu Dekan I

- 1) Sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi yaitu memperbaiki situasi belajar.
- 2) Sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam menciptakan situasi untuk menunjang situasi belajar mahasiswa ke arah yang lebih baik.
- 3) Sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam memberikan bantuan kepada dosen untuk memperbaiki situasi mengajar.
- 4) Sebagai pedoman untuk memperkembangkan kurikulum lebih lanjut.
- 5) Sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi kemajuan belajar mengajar.

d. Fungsi Kurikulum bagi Orang Tua Mahasiswa

Bagi orang tua kurikulum juga mempunyai fungsi, yaitu agar orang tua dapat turut serta membantu usaha perguruan tinggi dalam memajukan putra/putrinya. Bantuan orang tua dalam memajukan pendidikan ini dapat melalui konsultasi langsung tentang masalah-masalah yang menyangkut anak-anaknya. Di samping itu bantuan orang tua ini juga dapat melalui lembaga.⁹

Menurut Undang-Undang No. 20/2003 pasal 36, penyusunan kurikulum harus memperhatikan; memperhatikan Peningkatan iman dan takwa; peningkatan akhlak mulia; peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik; keragaman potensi daerah dan lingkungan; tuntutan pembangunan daerah dan nasional; tuntutan dunia kerja; perkembangan IPTEK dan seni; agama; dinamika perkembangan global; persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

3. Komponen Kurikulum

Menurut Nurgiantoro komponen-komponen kurikulum, yaitu:¹⁰

a. Komponen tujuan

Komponen tujuan ini mempunyai tiga jenis tahapan, yaitu :

1) Tujuan jangka panjang

Hal ini menggambarkan tujuan hidup yang diharapkan serta didasarkan pada nilai yang diambil dari filsafat. Tujuan ini tidak

⁹ Slameto, *Proses Belajar Mengajar dalam Sistem Kredit Semester (SKS)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 5-6

¹⁰ Burhan Nurgiyantoro, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah, Sebuah Pengantar teoretis dan Pelaksanaan*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), h. 16

berhubungan dengan tujuan sekolah, melainkan sebagai target setelah anak didik menyelesaikan sekolah.

2) Tujuan jangka menengah

Tujuan ini merujuk pada tujuan sekolah yang berdasarkan pada jenjangnya; SD, SMP, SMA, dan lain-lainnya.

3) Tujuan jangka dekat

Tujuan yang dikhususkan pada pembelajaran di kelas, misalnya; siswa dapat mengerjakan perkalian dengan betul, siswa dapat mempraktekkan shalat, dan sebagainya.

b. Komponen isi/materi

Isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi masing-masing bidang studi tersebut. Bidang studi itu disesuaikan dengan jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan yang ada. Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum menentukan isi atau content yang dilakukan sebagai kurikulum, terlebih dahulu perencanaan kurikulum harus menyeleksi isi agar menjadi lebih efektif dan efisien.

Kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan, antara lain :

- 1) Kebermaknaan;
- 2) Manfaat atau kegunaan;
- 3). Pengembangan manusia;

c. Komponen Media (sarana dan prasarana)

Media merupakan sarana prasarana dalam pembelajaran. Media merupakan perantara untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik dan agar memiliki retensi optimal. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pemakaian media dalam pengajaran secara tepat terhadap pokok bahasan yang disajikan pada peserta didik akan mempermudah peserta didik dalam menggapai, memahami isi sajian guru dalam pengajaran.

d. Komponen Strategi

Strategi merujuk pada pendekatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran, tetapi pada hakekatnya strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Strategi pengajaran berkaitan dengan cara penyampaian atau cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan baik secara umum maupun yang bersifat khusus.

e. Komponen proses belajar mengajar.

Komponen ini sangat penting dalam sistem pengajaran, sebab diharapkan melalui proses belajar mengajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Kemampuan guru dalam menciptakan suasana pengajaran yang kondusif, merupakan indikator kreativitas guru dalam mengajar. Hal tersebut bisa dicapai apabila guru dapat melaksanakan: 1) memusatkan diri dalam mengajar; 2) menerapkan metode yang pas

dalam mengajar; 3) memusatkan pada proses dan produknya; 4) memusatkan pada kompetensi yang relevan.¹¹

Adapun Tafsir menguraikan bahwa kurikulum mengandung empat komponen, yaitu tujuan, isi, metode, atau proses belajar mengajar, dan evaluasi. Setiap komponen dalam kurikulum tersebut sebenarnya saling terkait, bahkan masing-masing merupakan kegiatan integral dari kurikulum tersebut. Komponen tujuan mengarahkan atau menunjukkan sesuatu yang hendak dituju dalam proses belajar mengajar. Tujuan itu mula-mula bersifat umum. Dalam operasinya tujuan tersebut harus dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil atau khusus.¹²

Komponen isi (materi) dalam proses belajar mengajar harus relevan dengan tujuan pengajaran. Materi meliputi apa saja yang berhubungan dengan tujuan pengajaran. Komponen proses belajar mengajar melibatkan dua subyek pendidikan, yaitu peserta didik dan guru. Selain itu, proses belajar mengajar juga perlu dibantu dengan media atau sarana lain yang memungkinkan proses tersebut berjalan efektif dan efisien. Pemilihan atau penggunaan metode harus sesuai dengan kondisi serta berjalan secara fleksibel. Artinya, metode atau pendekatan dapat berubah-ubah setiap saat agar interaksi proses belajar mengajar tidak monoton dan menjenuhkan.

¹¹ Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), h. 35-36

¹² Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 89

Komponen evaluasi, yaitu untuk mengetahui dari hasil capaian ketiga komponen sebelumnya. Penelitian dapat digunakan untuk menentukan strategi perbaikan pengajaran. Selain itu, komponen evaluasi sangat berguna bagi semua pihak untuk melihat sejauh mana keberhasilan interaksi edukatif.¹³

Dari rumusan keempat komponen tersebut, penulis memahami bahwa kurikulum bukan sekedar kumpulan materi saja, atau juga bukan rencana pengajaran, tetapi kurikulum merupakan bagian keseluruhan yang berhubungan dengan interaksi pembelajaran di sekolah.

Menurut Hamalik komponen kurikulum meliputi:¹⁴

1) Tujuan

Tujuan kurikulum tiap satuan pendidikan harus mengacu ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2) Komponen materi kurikulum

Materi kurikulum pada hakikatnya adalah isi kurikulum. Dalam Undang-Undang Pendidikan, tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan bahwa isi kurikulum menerapkan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan

¹³ *Ibid.*, h. 53

¹⁴ Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), h. 23-30

pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.

3) Komponen metode

Metode adalah cara yang ditempuh guru dalam menyampaikan materi kepada anak didik. Metode sangat menentukan bagi keberhasilan suatu proses pembelajaran. Istilah metode yang lebih menekankan pada kegiatan guru selanjutnya diganti dengan istilah strategi pembelajaran.

4. Prinsip-Prinsip Kurikulum

Soetopo dan Soemanto menyatakan bahwa pengembangan kurikulum perlu memperhatikan prinsip-prinsip yaitu:¹⁵

a. Prinsip Relevansi

Kesesuaian pendidikan dengan tuntutan kehidupan, atau pendidikan dipandang relevan bila hasil yang diperoleh dari pendidikan tersebut fungsional dan berguna bagi kehidupan anak, meliputi relevan dengan lingkungan hidup peserta didik, relevan dengan perkembangan kehidupan sekarang dan untuk masa akan datang, relevan dengan tuntutan dalam dunia kerja.

b. Prinsip Efektif

Prinsip efektif ini berkaitan dengan sejauh mana apa yang direncanakan dapat dilaksanakan atau dapat dicapai, yang mencakup efektifitas mengajar dan efektifitas belajar.

¹⁵ Soetopo Hendayat dan Wasty Soemanto. 1993. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, Jakarta : Bumi Aksara), h. 48-50

c. Prinsip Efisiensi

Suatu usaha dengan membandingkan antara hasil yang dicapai (*output*) dengan usaha yang telah dikerjakan atau dikeluarkan (*input*) mencakup efisiensi dari segi waktu, tenaga, sarana prasarana yang menghasilkan efisiensi dalam segi biaya.

d. Prinsip Kontinuitas

Saling hubungan antara berbagai tingkat, jenjang dan jenis program pendidikan, baik mencakup kontinuitas antara berbagai tingkat sekolah, kontinuitas antara berbagai program studi.

e. Prinsip Fleksibilitas

Ada semacam ruang gerak yang memberikan kebebasan atau alternatif untuk bertindak, meliputi fleksibilitas dalam memilih program pendidikan dan fleksibilitas dalam mengembangkan program pengajaran.¹⁶

5. Jenis-Jenis Kurikulum

Adapun jenis-jenis kurikulum adalah sebagai berikut:

a. *Separated Subject Curriculum*

Kurikulum ini dipahami sebagai kurikulum mata pelajaran yang terpisah satu sama lainnya. Kurikulum mata pelajaran terpisah (*separated subject curriculum*) berarti kurikulumnya dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, yang kurang mempunyai keterkaitan dengan matapelajaran lainnya. Konsekuensinya, anak didik harus semakin

¹⁶ Soetopo Hendayat dan Wasty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1993), h. 48-50

banyak mengambil matapelajaran. Tyler dan Alexander menyebutkan bahwa jenis kurikulum ini digunakan dengan *school subject*, dan sejak beberapa abad hingga saat ini pun masih banyak didapatkan di berbagai lembaga pendidikan. Kurikulum ini terdiri dari mata pelajaran-mata pelajaran, yang tujuan pelajarannya adalah anak didik harus menguasai bahan dari tiap-tiap mata pelajaran yang telah ditentukan secara logis, sistematis, dan mendalam. Kurikulum matapelajaran dapat menetapkan syarat-syarat minimum yang harus dikuasai anak, sehingga anak didik bisa naik kelas. Biasanya bahan pelajaran dan textbook merupakan alat dan sumber utama pelajaran. Kurikulum matapelajaran atau subject curriculum terdiri dari mata pelajaran (*subject*) yang terpisah-pisah, dan subjek itu merupakan himpunan pengalaman dan pengetahuan yang diorganisasikan secara logis dan sistematis oleh para ahli kurikulum (*experts*). Kalau kita lihat gambar berikut, diharapkan akan semakin jelas kurikulum matapelajaran ini.¹⁷

b. *Correlated Curriculum*

Kurikulum jenis ini mengandung makna bahwa sejumlah mata pelajaran dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga ruang lingkup bahan yang tercakup semakin luas. Sebagai contoh, pada mata pelajaran Fiqih apat dihubungkan dengan mata pelajaran Alqur'an dan Hadis. Pada saat anak didik mempelajari solat, dapat dihubungkan dengan mata pelajaran Alqur'an dan Hadis. Pada saat anak didik

¹⁷ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori&Praktik*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h. 141

mempelajari sholat, dapat dihubungkan dengan pelajaran Al-Qur'an (Surat Al-Fatihah, dan surat lainnya) dan hadis yang berhubungan dengan sholat, dan lain sebagainya. Masih banyak cara lain menghubungkan matapelajaran dalam kegiatan kurikulum. Korelasi tersebut dengan memperhatikan tipe korelasinya, yakni:

- 1) Korelasi okkasional/ insidental. Maksudnya korelasi dilaksanakan secara tiba-tiba atau incidental. Misalnya: pada pelajaran sejarah dapat dibicarakan tentang geografi dan tumbuh-tumbuhan.
- 2) Korelasi etis. Bertujuan mendidik budi pekerti sehingga konsentrasi pelajarannya dipilih pendidikan agama. Misalnya pada pendidikan agama itu dibicarakan cara-cara menghormati tamu, orangtua, tetangga, kawan, dan lain sebagainya.
- 3) Korelasi sistematis. Korelasi ini biasanya direncanakan oleh guru. Misalnya: bercocok tanam padi dibahas dalam geografi dan ilmu tumbuh-tumbuhan.¹⁸

c. *Broad Fields Curriculum*

Kurikulum *Broad Fields* adalah usaha meningkatkan kurikulum dengan mengkombinasikan beberapa mata pelajaran. Sebagai contoh mata pelajaran sejarah, geografi, ilmu ekonomi, dan ilmu politik disatukan menjadi ilmu pengetahuan sosial (IPS). Kurikulum *broad fields* mempunyai enam macam yang umumnya ditemukan di dalam kurikulum sekolah dasar. Keenam kurikulum *broad fields* yang dimaksud yaitu

¹⁸ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori&Praktik*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h. 143

bahasa (*Language*), ilmu pengetahuan sosial (*Social Studies*), matematika (*Maths*), sains (*Science*), kesehatan dan pendidikan Olahraga (*Health & Sport*), dan kesenian (*arts*). Keunggulan kurikulum *broad fields* adalah adanya kombinasi matapelajaran sehingga manfaatnya akan semakin dirasakan dan memungkinkan adanya mata pelajaran yang kaya akan pengertian dan mementingkan dasar serta generalisasi. Sedangkan kelemahannya adalah hanya memberikan pengetahuan secara sketsa, abstrak, dan kurang logis dari suatu mata pelajaran.¹⁹

d. *Integrated Curriculum*

Kurikulum terpadu (*integrated curriculum*) merupakan suatu produk dari usaha pengintegrasian bahan pelajaran dari berbagai macam pelajaran. Integrasi diciptakan dengan memusatkan pelajaran pada masalah tertentu yang memerlukan solusinya dengan materi atau bahan dari berbagai disiplin atau matapelajaran. Kurikulum jenis ini membuka kesempatan yang lebih banyak untuk melakukan kerja kelompok, masyarakat dan lingkungan sebagai sumber belajar, mementingkan perbedaan individual anak didik, dan dalam perencanaan pelajaran siswa diikutsertakan. Kurikulum terpadu sangat mengutamakan agar anak didik dapat memiliki sejumlah pengetahuan secara fungsional dan mengutamakan proses belajarnya. Yang dimaksudkan cara memperoleh ilmu secara fungsional adalah karena ilmu tersebut dikelompokkan berhubungan dengan usaha memecahkan masalah yang ada. Sebagai

¹⁹ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori&Praktik*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h. 145

contoh, dengan belajar membuat radio, anak didik sekaligus mempelajari hal-hal lain yang berkaitan dengan listrik, siaran, penerimaan, dan sebagainya. *Integrated curriculum* mempunyai ciri yang sangat fleksibel dan tidak menghendaki hasil belajar yang sama dari semua anak didik.²⁰

6. Kurikulum Pendidikan Tinggi

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan memiliki sistem untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Sistem pendidikan tinggi di Indonesia memiliki empat tahapan pokok, yaitu *input*, *proses*, *output*, dan *outcomes*. Peserta didik di Perguruan Tinggi (PT) adalah lulusan SMA, MA, dan SMK sederajat yang mendaftarkan diri untuk berpartisipasi mendapatkan pengalaman belajar dalam proses pembelajaran yang telah ditawarkan. Input yang baik memiliki beberapa indikator, antara lain nilai kelulusan yang baik, namun yang lebih penting adalah adanya sikap dan motivasi belajar yang memadai. Kualitas input sangat tergantung pada pengalaman belajar dan capaian pembelajaran calon mahasiswa. Sebelum tahun 2000 proses penyusunan kurikulum disusun berdasarkan tradisi 5 tahunan (jenjang S1) atau 3 tahunan (jenjang D3) yang selalu menandai berakhirnya tugas satu perangkat kurikulum. Selain itu, disebabkan pula oleh rencana strategis Perguruan Tinggi yang memuat visi dan misi Perguruan Tinggi juga telah berubah. Sebagian besar alasan perubahan kurikulum berasal dari permasalahan internal Perguruan Tinggi sendiri. Hal ini bukan suatu kesalahan. Namun pada situasi global seperti saat ini,

²⁰ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori&Praktik*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h. 147

dimana percepatan perubahan terjadi di segala sektor, maka akan sulit bagi masyarakat untuk menahan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Pada masa sebelum tahun 1999 (*pre- milleniumera*) perubahan IPTEKS yang terjadi tidak secepat setelah tahun 2000. Jika dipahami dengan lebih dalam berdasarkan sistem pendidikan yang telah dijelaskan di atas, maka jika terjadi perubahan pada tuntutan dunia kerja sudah sewajarnya proses di dalam Perguruan Tinggi perlu untuk beradaptasi. Alasan inilah yang seharusnya dikembangkan untuk melakukan perubahan kurikulum Perguruan Tinggi di Indonesia.²¹

Menurut Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang RI No.12 tahun 2012 tentang Undang-Undang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.²² Kurikulum Perguruan Tinggi diatur oleh pemerintah dalam UU No. 2 tahun 1989, PP No. 60 Tahun 1999. Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Kurikulum pendidikan tinggi

²¹ Tim Kurikulum dan Pembelajaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Pendidikan Tinggi, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Buku Kurikulum, 2014), h. 3-6

²² Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Pasal 35 ayat 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diakses pada 5 Maret 2019 dari http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17624/UU0122012_Full.pdf

dikembangkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 38 ayat 3 dan 4, Kmenterian Pendidikan Nasional No. 232/U/2000, dan perubahan kurikulum inti di Kepmendiknas No 045/U/2002. Selanjutnya Perguruan Tinggi dapat mengembangkan Kurikulum sendiri, hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 19 Tahun 2005 Pasal 17 ayat 4, PP 17 Tahun 2010 pasal 97 ayat 2. Kurikulum yang dikembangkan Berbasis Kompetensi, yang diatur dalam peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 pasal 97 ayat 1 dan minimum mengandung 5 elemen kompetensi yang juga diatur dalam peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 pasal 17 ayat 3. Sedangkan capaian pembelajaran sesuai dengan level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diatur dalam peraturan Presiden No. 08 tahun 2012. Kompetensi lulusan ditetapkan dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) diatur dalam UU PT No. 12 Tahun 2012 pasal 29.²³

C. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan SKKNI merupakan acuan yang menjadi standar dalam hubungannya dengan kemampuan kerja yang meliputi aspek keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang sesuai dengan pelaksanaan tugasnya serta sesuai dengan persyaratan dari pekerjaan yang sudah ditetapkan dimana semua standar atau ketentuan dalam

²³ Nurul Widiastuti, *Kurikulum Pendidikan Tinggi*, (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kurikulum Lembaga Pengembangan Pendidikan, Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni (LP2KHA) Institut Teknologi Sepuluh Nopember: Surabaya, 2017), h. 1-3

SKKNI sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, SKKNI merupakan standar kompetensi tenaga kerja yang berlaku secara nasional di Indonesia dan merupakan standar kompetensi bersifat lintas perusahaan.²⁴ Setelah kompetensi dikuasai, diharapkan yang bersangkutan akan mampu:

1. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan.
2. Mengorganisasikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan .
3. Mampu menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah
4. Mampu menyesuaikan kemampuan yang dimiliki bila bekerja pada lingkungan yang berbeda.²⁵

D. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional dan sistem penilaian kesetaraan nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumberdaya manusia dari capaian pembelajaran, yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya serta kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing. Prinsip dasar yang dikembangkan dalam KKNI adalah menilai unjuk kerja seseorang dalam aspek-aspek keilmuan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan capaian pembelajaran (learning outcomes) yang diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang telah dilampauinya, yang setara dengan deskriptor kualifikasi untuk suatu

²⁴Direktori Training Indonesia, *Perbedaan Antara SKKNI dengan KKNI*, diakses dalam <http://direktoritraining.com/perbedaan-antara-skni-dengan-kkni/> pada tanggal 12 Agustus 2019.

²⁵Diakses dalam <https://sertifikasibnsp.com/skni/> pada tanggal 12 Agustus 2019

jenjang tertentu. Terkait dengan proses pendidikan, capaian pembelajaran merupakan hasil akhir atau akumulasi proses peningkatan keilmuan, keahlian dan keterampilan seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal atau nonformal. Dalam arti yang lebih luas, capaian pembelajaran juga diartikan sebagai hasil akhir dari suatu proses peningkatan kompetensi atau karir seseorang selama bekerja. Pinsip dasar ini sesuai dengan pendekatan yang dilakukan oleh negara-negara lain dalam mengembangkan kerangka kualifikasi masing-masing. Pada proses penyusunan konsep-konsep KKNI, studi banding juga telah dilakukan ke berbagai negara untuk dapat mengembangkan KKNI yang sebanding dengan kerangka kualifikasi negaranegara lain. Kesepadanan antara KKNI dengan kerangka kualifikasi negara-negara lain sangat diperlukan agar KKNI dapat dipahami dan diakui sebagai sebuah sistem kualifikasi yang handal dan terpercaya. Selanjutnya, dengan adanya pengakuan dan kepercayaan terhadap KKNI maka kerjasama atau program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan antara Indonesia dengan negara-negara lain akan lebih mudah diwujudkan.²⁶

KKNI merupakan kerangka acuan yang dijadikan ukuran dalam pengakuan penjenjangan pendidikan. KKNI juga disebut sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Menurut Perpres No. 08 tahun 2012, KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait

²⁶ Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia*, Dokumen KKNI 24 Oktober 2015 h. 4-5

dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa KKNI merupakan program studi yang mengharuskan sistem pendidikan di Perguruan Tinggi memperjelas profil lulusannya, sehingga dapat disesuaikan dengan kelayakan dalam sudut pandang analisa kebutuhan masyarakat. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadikan sistem yang dianut oleh setiap Perguruan Tinggi haruslah berangsur diubah. Seiring dengan kebutuhan dan tuntutan tersebut, perubahan kurikulum ini menjadi upaya untuk pengembangan inovasi terhadap suatu tuntutan tersebut. Respon terhadap perubahan kurikulum ini dapat dilihat dari banyaknya aturan yang memayungi penerapan kurikulum baru, misalnya UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden No.8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Perpres No. 08 tahun 2012 dan Pemendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Capaian Pembelajaran Sesuai dengan Level KKNI, UU PT No. 12 tahun 2012 pasal 29 tentang Kompetensi lulusan ditetapkan dengan mengacu pada KKNI, Permenristek dan Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kurikulum ini menuntut mahasiswa memiliki kemampuan yang memenuhi kriteria seperti:

1. Dalam aspek Attitude
2. Bidang kemampuan kerja
3. Pengetahuan
4. Managerial dan Tanggung Jawab

Dengan adanya target pencapaian ini, Perguruan Tinggi harus mampu menjabarkan sebuah capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah yang ada sehingga tersusun sesuai kebutuhan profil kelulusan.²⁷

KKNI terdiri dari 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari Kualifikasi 1 sebagai kualifikasi terendah dan Kualifikasi 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan/atau pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja. Implikasi KKNI pada Pendidikan Tinggi meliputi:

1. Penataan jenis dan strata pendidikan
2. Penyetaraan mutu lulusan
3. Pengembangan kurikulum
4. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu
5. Memfasilitasi pendidikan sepanjang hayat

Deskripsi kualifikasi KKNI dirumuskan capaian pembelajaran meliputi:

1. Capaian Pembelajaran (*learning outcomes*):

Internasionalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

²⁷ Anna Zakiyyah Derajat (Pegiat komunitas penulis Coretan Pena, teater EKSA, PMII RCC, debater Al Motoyat Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Yogyakarta), *Kurikulum Berbasis KKNI*, diakses di <https://geotimes.co.id/opini/penerapan-kurikulum-berbasis-kkni-di-perguruan-tinggi> pada tanggal 04 Agustus 2019

2. Kompetensi (*competency*):

Akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya.²⁸

²⁸ Liliana Sugiharto, *Kurikulum Pendidikan Tinggi*, dipresentasikan pada LS-KOPERTIS 3 tahun di Jakarta pada tanggal 11 bulan November 2015